

Optimalisasi *Tax Amnesty* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Aditiyanto Ekaputra

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Indonesia

*Email Corresponding Author:

aditiyanto@feshum.ummada.ac.id

Receipt: 14 November 2025; Revision: 20 November 2025; Accepted: 23 Desember 2025

Abstrak: Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan tersebut adalah melalui kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan penelitian terkait *tax amnesty* menggunakan pendekatan analisis bibliometrik dengan bantuan perangkat lunak VOSviewer. Data diperoleh dari 100 artikel ilmiah terindeks Google Scholar selama periode 2021–2024, selanjutnya artikel sesuai dengan kriteria inklusi didapatkan sebanyak 79 artikel yang relevan dengan topik *tax amnesty*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema dominan dalam literatur *tax amnesty* berpusat pada hubungan antara kebijakan fiskal, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan negara. Terdapat tiga kluster utama yang teridentifikasi, yaitu: (1) kebijakan dan administrasi fiskal, (2) perilaku dan kepatuhan wajib pajak, serta (3) dampak ekonomi dan penerimaan negara. Analisis *overlay visualization* menunjukkan pergeseran fokus penelitian dari aspek kebijakan menuju perilaku wajib pajak dan efektivitas fiskal. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman akademik tentang optimalisasi kebijakan *tax amnesty* melalui pendekatan integratif antara kepatuhan sukarela, kepercayaan fiskal, dan digitalisasi perpajakan.

Kata kunci: Bibliometrik; Kepatuhan pajak; Penerimaan negara; *Tax amnesty*; VOSviewer

Abstract: Tax revenue is a primary source of state revenue, playing a crucial role in maintaining fiscal stability and supporting sustainable development. One government effort to increase this revenue is through the tax amnesty policy. However, the effectiveness of this policy remains a matter of debate in various countries, including Indonesia. This study aims to map the development of research related to tax amnesty using a bibliometric analysis approach with the assistance of VOSviewer software. Data were obtained from 100 scientific articles indexed by Google Scholar during the 2021–2024 period. Furthermore, articles that met the inclusion criteria were identified as 79 articles relevant to the topic of tax amnesty. The results show that the dominant theme in the tax amnesty literature centers on the relationship between fiscal policy, taxpayer compliance, and state revenue. Three main clusters were identified: (1) fiscal policy and administration, (2) taxpayer behavior and compliance, and (3) economic impact and state revenue. Overlay visualization analysis shows a shift in research focus from policy aspects to taxpayer behavior and fiscal effectiveness. This research contributes to enriching academic understanding of optimizing tax amnesty policies through an integrative approach between voluntary compliance, fiscal trust, and tax digitalization.

Keywords: Bibliometrics; Tax amnesty; Tax compliance; State revenue; VOSviewer

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi sebagai instrumen pembangunan nasional serta alat kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas fiskal dan



kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pajak menyumbang lebih dari 70% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadikannya tulang punggung utama pembiayaan publik (Kementerian Keuangan, 2023). Namun, capaian rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lain seperti Thailand dan Malaysia, yaitu berada di kisaran 10–11% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pajak yang belum tergal optimal, yang disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan sistem administrasi perpajakan. Salah satu kebijakan strategis yang ditempuh pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara adalah melalui program *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan aset dan pendapatan yang belum dilaporkan dengan imbalan penghapusan sanksi administratif maupun pidana pajak. Program ini telah diterapkan di banyak negara seperti Argentina, India, dan Afrika Selatan dengan hasil yang bervariasi. Di Indonesia, implementasi *tax amnesty* tahun 2016 dan program *Voluntary Disclosure Program (PPS)* tahun 2022 menunjukkan peningkatan sementara dalam penerimaan pajak serta memperluas basis data perpajakan nasional. Meskipun demikian, efektivitas jangka panjang program tersebut terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji dampak *tax amnesty* dari berbagai perspektif, baik dari sisi kebijakan fiskal, kepatuhan pajak, maupun efek ekonomi. Misalnya, Ikung dan Haryana (2023), menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Situmorang dan Pratama (2023), menyoroti bahwa Kebijakan *tax amnesty* memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan pajak secara umum, terutama pada periode awal penerapannya di tahun 2016. Namun, jika dilihat secara lebih spesifik, kebijakan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi non karyawan, maupun orang pribadi karyawan. Dengan demikian sebagian besar penelitian masih bersifat empiris terbatas dan belum memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana topik *tax amnesty* dikembangkan, berelasi, dan bertransformasi dalam literatur ilmiah global.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana *tax amnesty* dikaji dalam literatur akademik selama periode 2021–2024, serta bagaimana arah perkembangannya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara. Dengan pendekatan bibliometrik, yaitu pendekatan kuantitatif untuk menelusuri, memetakan, dan mengevaluasi perkembangan penelitian melalui publikasi ilmiah, sitasi, dan keterkaitan kata kunci (Donthu et al., 2021). Pendekatan ini juga relevan untuk mengungkap bagaimana kebijakan pengampunan pajak bertransformasi dari sekadar instrumen fiskal menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis kepercayaan dan digitalisasi sistem perpajakan (*digital fiscal ecosystem*). Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memetakan hubungan konseptual antar tema utama, mengidentifikasi tren global penelitian *tax amnesty*, serta merumuskan rekomendasi konseptual dalam upaya optimalisasi kebijakan pajak di masa depan.

KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan pajak

Kepatuhan perpajakan tercermin ketika warga negara melaksanakan seluruh kewajiban pajaknya sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Kepatuhan ini sebaiknya didasarkan pada kesadaran individu untuk memahami tindakan yang sesuai dengan hukum dan

mengendalikan diri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Andreansyah dan Farina, 2022).

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan kondisi di mana wajib pajak mampu melaksanakan seluruh kewajiban serta memenuhi hak-haknya yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan (Zaikin et al, 2023).

Kepatuhan wajib pajak menurut Ekaputra (2025) merupakan kondisi ketika wajib pajak menjalankan seluruh kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini mencakup perhitungan kewajiban pajak dengan benar, ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran, serta penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tax amnesty

Menurut Pravasanti (2018), *tax Amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan atas pajak terutang melalui pembayaran tebusan dalam jumlah tertentu. Kebijakan ini bertujuan memberi kesempatan bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakannya, serta berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara.

Tax Amnesty menurut Larasati dan Binekas (2019) merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh setiap wajib pajak yang berkewajiban menyampaikan SPT Tahunan, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menganalisis hasil data penelitian terdahulu dan selanjutnya di telaah. Sumber pengumpulan data berasal dari artikel-artikel yang sesuai dengan topik. Pada penelitian ini juga menetapkan kriteria inklusi yang ditetapkan adalah artikel yang dipublikasi dalam kurun waktu 4 tahun (2021 sampai 2024), artikel yang menganalisis *tax amnesty* (pengampunan pajak) dari studi kasus, serta artikel yang dapat diakses (*open access*). Artikel tersebut didapatkan melalui *search google scholar*, sehingga diperoleh 100 artikel. Selanjutnya artikel tersebut dipindahkan ke mendeley dan dilakukan skrining yang sesuai dengan kriteria inklusi didapatkan sebanyak 79 artikel dan kemudian melengkapi abstrak serta *keywords*. Langkah terakhir dilakukan analisis pemetaan dengan menggunakan VOSviewer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tren Publikasi Artikel Tahun 2021-2024

Berikut ini gambar hasil analisis tren publikasi artikel mengenai *tax amnesty* (pengampunan pajak) dari tahun 2021 hingga 2024. Distribusi publikasi artikel periode 2021–2024 menunjukkan produktivitas penelitian yang relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Jumlah publikasi meningkat pada 2022 sebagai puncak periode analisis, kemudian kembali stabil pada 2023 dan mengalami sedikit penurunan pada 2024. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan konsistensi perhatian akademik terhadap topik yang dikaji, meskipun terjadi penurunan moderat pada tahun terakhir.



Gambar 1. Tren publikasi artikel 2021-2024

Analisis Sintesis Artikel

Berikut ini tabel hasil sintesis lima artikel berdasarkan tahun publikasi artikel dari 2021 hingga 2024 yang diambil secara random.

Tabel 1. Analisis sintesis artikel tahun 2021

No	Penulis	Judul Artikel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Boa dan Subakir (2021)	Pengaruh <i>Tax amnesty</i> dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kelurahan Ketintang Surabaya Selatan	Kuantitatif	1) <i>Tax amnesty</i> mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 2) Sanksi pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
2	Erawati dan Rahayu (2021)	Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran dan <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Kuantitatif	1) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2) Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 3) <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang
3	Koapaha dan Pantow (2021)	Tingkat Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan <i>Tax amnesty</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bei	Kuantitatif	1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan sektor pertambangan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan <i>Tax amnesty</i> . Hal ini terlihat dari hasil analisis terhadap beberapa rasio keuangan utama, yaitu Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, dan Return on Equity, yang seluruhnya menunjukkan hasil tidak signifikan. 2) Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan <i>Tax amnesty</i> belum memberikan dampak nyata terhadap kondisi finansial perusahaan di sektor pertambangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

				kebijakan tersebut lebih berpengaruh pada aspek administrasi dan kepatuhan perpajakan, tetapi belum mampu meningkatkan efisiensi maupun profitabilitas perusahaan secara langsung pada periode setelah implementasinya.
4	Maharani et al (2021)	Pengaruh <i>Tax amnesty</i> E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Badung Selatan	Kuantitatif	Dari ketiga variabel terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
5	Saputra et al (2021)	Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan	Kuantitatif	1) Moral Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) Kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. Analisis sintesis artikel tahun 2022

No	Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aulia (2022)	Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kebijakan <i>Tax amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng	Kuantitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan, penerapan sanksi perpajakan, serta kebijakan <i>tax amnesty</i> memiliki peran positif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng.
2	Ewanan dan Sari (2022)	Dampak kebijakan keringanan pajak terhadap penerimaan pajak, <i>tax ratio</i> , dan perubahan penerimaan pajak: Analisis pengampunan pajak, sunset policy, dan program pengungkapan sukarela di Indonesia	Kualitatif	Penerapan kebijakan keringanan pajak seperti pengampunan pajak (<i>tax amnesty</i>), sunset policy, atau program pengungkapan sukarela dinilai dapat membuka peluang terjadinya ketidakadilan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena selama kebijakan tersebut diterapkan, terutama pada program sunset policy yang dampaknya tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila. Selain itu, pelaksanaan kebijakan keringanan perpajakan juga berpotensi menimbulkan praktik pencucian uang yang dapat merugikan sistem perpajakan dan integritas keuangan negara.
3	Pratinkjo dan Lasdi (2022)	Pengaruh Sanksi Pajak dan <i>Tax amnesty</i> Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kebijakan <i>tax amnesty</i> memiliki pengaruh terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak.

				Sanksi pajak yang diterapkan dengan tingkat yang lebih tinggi cenderung mendorong peningkatan keputusan wajib pajak untuk patuh dibandingkan dengan sanksi yang lebih ringan. Selain itu, keberadaan program <i>tax amnesty</i> juga berkontribusi dalam meningkatkan keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan kondisi ketika <i>tax amnesty</i> tidak diberlakukan.
4	Pulu et al (2022)	Analisis Penerapan <i>Tax amnesty</i> Jilid I di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>Tax amnesty</i> jilid I di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Selain itu, pelaksanaannya dinilai berhasil karena mampu melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga mendapatkan apresiasi positif dari pemerintah atas keberhasilan implementasinya.
5	Susanti et al (2022)	Kebijakan Program <i>Tax amnesty</i> Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Program <i>Tax amnesty</i> 2016–2017)	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari pelaksanaan program <i>tax amnesty</i> menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengampunan pajak, berupa penghapusan pajak terutang serta pembebasan dari sanksi administrasi dan pidana perpajakan. Dengan demikian, kebijakan ini mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa mendatang.

Tabel 3. Anilisis sintesis artikel tahun 2023

No	Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Darma dan Sudarti (2023)	Analisis Penerapan Tax Amnesty Terhadap Rasio Pajak Secara Nasional Dan Regional (Kabupaten Dan Kota Serang, Kabupaten Lebak, Pandeglang & Kota Cilegon)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program <i>tax amnesty</i> belum mampu meningkatkan <i>tax ratio</i> pada tingkat nasional. Namun demikian, penerapan program tersebut terbukti dapat meningkatkan <i>tax ratio</i> pada tingkat regional, khususnya di wilayah Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, serta Kota Cilegon dan Serang. Selain itu, program <i>tax amnesty</i> juga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan rata-rata <i>tax ratio</i> regional dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata <i>tax ratio</i> nasional.

2	Manubulu dan Cardoso (2023)	Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti <i>tax amnesty</i> pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang	Kuantitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap minat wajib pajak untuk berpartisipasi dalam program <i>tax amnesty</i> . Sebaliknya, tarif pajak, sanksi pajak, serta kemudahan dalam pelaksanaan program tersebut terbukti memiliki pengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak untuk mengikuti <i>tax amnesty</i> .
3	Wulan et al (2023)	Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak	Yuridis Normatif	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4	Wulaningrum (2023)	Analisis pengawasan pada wajib pajak pasca <i>tax amnesty</i> dalam meningkatkan penerimaan pajak (Studi kasus KPP Pratama Pekalongan)	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan <i>tax amnesty</i> , upaya pengawasan terhadap wajib pajak difokuskan pada mereka yang memiliki potensi pajak besar. Bagi wajib pajak yang telah mengikuti <i>tax amnesty</i> namun masih terdapat data yang belum dilaporkan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan pas final. Sementara itu, wajib pajak yang tidak mengikuti <i>tax amnesty</i> dan belum melaporkan seluruh hartanya diarahkan untuk mengikuti pas final. Namun demikian, pengawasan terhadap wajib pajak pasca <i>tax amnesty</i> yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan dinilai masih belum berjalan secara optimal.
5	Siregar et al (2023)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan belawan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil pengujian memperlihatkan bahwa kedua variabel, yakni kesadaran wajib pajak dan program <i>tax amnesty</i> , memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

Tabel 4. Anilisis sintesis artikel tahun 2024

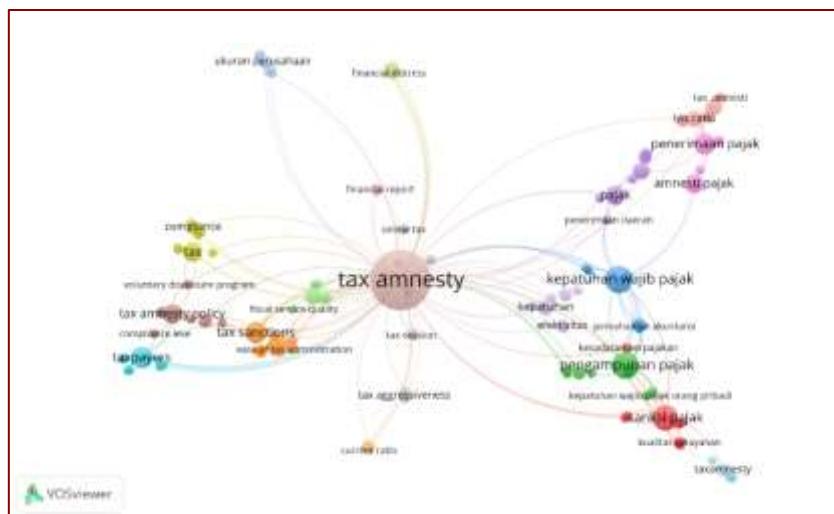
No	Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arif et al (2024)	Analisis efektivitas penerapan <i>tax amnesty</i> di Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Penerapan amnesti pajak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wajib pajak, yang tercermin dalam perhitungan tarif efektif melalui adanya pertambahan jumlah wajib pajak. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan <i>tax amnesty</i> dalam mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap deklarasi pajak masih belum optimal, karena tujuan dan hasil yang diharapkan dari

2	Arifah dan Hariyanti (2024)	Analisis <i>Financial Distress</i> Pada Saat <i>Tax Amnesty</i> dan Setelah <i>Tax Amnesty</i>	Kuantitatif	peningkatan kepatuhan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat akurasi masing-masing model, baik pada data yang diambil selama pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> maupun setelah program tersebut berakhir. Dari kedua periode tersebut, model Zmijewski terbukti memiliki tingkat akurasi prediksi tertinggi dibandingkan model lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kewajiban moral, serta program <i>tax amnesty</i> secara simultan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3	Januanisa dan Budiarti (2024)	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kewajiban moral dan <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kewajiban moral, serta program <i>tax amnesty</i> secara simultan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4	Manik dan Harianto (2024)	Dampak kebijakan pengampunan pajak (<i>tax amnesty</i>) terhadap kesadaran hukum masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar pajak	Hukum Normatif dan Deskriptif	1) Tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, adanya praktik penghindaran pajak, perlawanan dari wajib pajak, serta tingkat kepatuhan yang masih rendah turut menjadi faktor penghambat utama. 2) Kebijakan pengampunan pajak (<i>tax amnesty</i>) diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang nantinya akan dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan nasional. 3) Kebijakan <i>tax amnesty</i> menimbulkan dilema keadilan bagi wajib pajak yang patuh, karena fasilitas tersebut justru lebih banyak diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh. Kondisi ini berpotensi memengaruhi perilaku wajib pajak, menurunkan kesadaran hukum dalam membayar pajak, serta mendorong terjadinya penundaan pembayaran pajak. Bahkan, sebagian wajib pajak mungkin sengaja menunda pembayaran dengan harapan akan ada program pengampunan pajak di masa mendatang, yang pada akhirnya dapat menurunkan penerimaan pajak negara.

5	Suryati dan Hama (2024)	Analisis <i>tax amnesty</i> dan <i>tax morale</i> terhadap <i>tax compliance</i> pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya gubeng	Kuantitatif	1) <i>Tax amnesty</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak (<i>tax compliance</i>) 2) <i>Tax morale</i> terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak (<i>tax compliance</i>)
---	-------------------------	--	-------------	---

Analisis Tren Network Visualization

Hasil *network visualization* menunjukkan bahwa tax amnesty merupakan tema sentral dengan frekuensi kemunculan tertinggi dalam literatur. Peta jaringan memperlihatkan keterkaitan antartema yang membentuk dua fokus utama penelitian. Klaster pertama menekankan aspek kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, termasuk sanksi, kesadaran perpajakan, dan tax ratio. Klaster kedua berfokus pada kebijakan dan administrasi perpajakan, seperti tax amnesty policy, tax compliance, dan faktor struktural lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa kajian tax amnesty berkembang sebagai isu multidimensional yang mencakup aspek kebijakan, perilaku wajib pajak, serta dampaknya terhadap penerimaan negara.



Gambar 2. Network Visualization

Analisis Tren Overlay Visualization

Hasil *overlay visualization* menunjukkan adanya pergeseran temporal penelitian tax amnesty periode 2021–2024. Pada fase awal, kajian didominasi oleh isu kebijakan dan aspek struktural seperti tax amnesty policy, sanksi pajak, dan variabel ekonomi. Namun, pada periode terbaru, fokus penelitian bergeser ke arah kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, dan efektivitas kebijakan, dengan penekanan pada dimensi perilaku dan sosial. Temuan ini mencerminkan perubahan paradigma penelitian dari orientasi kebijakan menuju evaluasi dampak dan perilaku wajib pajak.



Hasil *density visualization* menunjukkan bahwa tax amnesty merupakan tema paling dominan dengan tingkat kepadatan tertinggi dalam literatur. Kepadatan tinggi juga terlihat pada temkepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, sanksi pajak, serta kebijakan tax amnesty, yang menandakan fokus utama penelitian pada efektivitas kebijakan dan aspek administrasi perpajakan. Sementara itu, tema seperti *financial distress* dan *company size* muncul sebagai isu pendukung dengan intensitas lebih rendah. Temuan ini menegaskan bahwa penelitian tax amnesty berpusat pada keterkaitan antara kebijakan fiskal, kepatuhan pajak, dan penerimaan negara.



Berdasarkan hasil analisis bibliometrik terhadap item *clustering* yang ditampilkan, struktur tema penelitian terkait perpajakan menunjukkan adanya tiga kluster utama yang merepresentasikan orientasi konseptual dan fokus kajian ilmiah yang berbeda namun saling berkaitan. Kluster pertama berfokus pada kebijakan dan administrasi fiskal, yang mencakup tema seperti *tax amnesty policy*, *tax sanctions*, *tax administration*, dan *tax compliance*. Kluster ini

merepresentasikan kajian yang menelaah peran regulasi, sistem administrasi, serta kualitas pelayanan perpajakan dalam mendukung implementasi kebijakan pengampunan pajak.

Klaster kedua menitikberatkan pada perilaku dan kepatuhan wajib pajak, dengan tema utama meliputi kepatuhan pajak, kesadaran perpajakan, moral pajak, pemahaman peraturan, serta kualitas pelayanan fiskal. Klaster ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulatif, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi fiskal. Klaster ketiga berkaitan dengan dampak ekonomi dan penerimaan negara, yang mencakup isu penerimaan pajak, tax ratio, efektivitas tax amnesty, serta keterkaitannya dengan kondisi ekonomi makro dan keuangan perusahaan. Kajian dalam klaster ini menilai sejauh mana kebijakan tax amnesty berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dan stabilitas fiskal.

Secara keseluruhan, ketiga klaster tersebut menunjukkan bahwa penelitian tax amnesty berkembang secara multidimensional, mengintegrasikan perspektif kebijakan fiskal, perilaku wajib pajak, dan dampak ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi kebijakan tax amnesty tidak dapat dipisahkan dari penguatan administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan sukarela, serta evaluasi efektivitas kebijakan terhadap penerimaan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tren publikasi dari tahun 2021 hingga 2024 terdapat dinamika produktivitas penelitian yang relatif stabil namun dengan sedikit fluktuasi antar tahun. Selanjutnya hasil dari analisis sintesis artikel memberikan sebuah informasi riset yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan membahas dengan topik atau tema *tax amnesty* (pengampunan pajak). Berikutnya hasil analisis bibliometrik dengan menggunakan VOSviewer dapat disimpulkan bahwa tema dominan dalam literatur *tax amnesty* berpusat pada hubungan antara kebijakan fiskal, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan negara. Terdapat tiga klaster utama yang teridentifikasi, yaitu: (1) kebijakan dan administrasi fiskal, (2) perilaku dan kepatuhan wajib pajak, serta (3) dampak ekonomi dan penerimaan negara. Analisis *overlay visualization* menunjukkan pergeseran fokus penelitian dari aspek kebijakan menuju perilaku wajib pajak dan efektivitas fiskal. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman akademik tentang optimalisasi kebijakan *tax amnesty* melalui pendekatan integratif antara kepatuhan sukarela, kepercayaan fiskal, dan digitalisasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097-2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>.
- Arif, M. D., Siregar, A. A., & Sipahutar, S. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia. *Baashima: Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen*, 2(1), 73-82. <https://doi.org/10.61492/baashima.v2i1.153>.
- Arifah, W. N., & Hariyanti, A. (2024). Analisis Financial Distress Pada Saat Tax Amnesty dan Setelah Tax Amnesty. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(2), 187-197. <https://doi.org/10.56855/analysis.v2i2.1153>.
- Aulia, F. (2022). Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kebijakan *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.46821/equity.v3i1.318>.

- Larasati, A. Y., & Binekas, B. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak. (Studi Kasus pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), 1339-1354.
- Boa, E., & Subakir. (2021). Pengaruh Tax amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kelurahan Ketintang Surabaya Selatan. *Journal of Sustainability Bussiness Research (JSBR)*, 2(4), 144-153. <https://doi.org/10.36456/jsbr.v2i4.4790>.
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Ahyani, F. (2024). Variabel Dominan yang Memengaruhi Penggelapan Pajak: Systematic Literature Review. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi*, 7(2), 13-34. <https://doi.org/10.35138/organum.v7i2.337>.
- Ekaputra, A. (2025). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Systematic Literature Review. *Jurnal Entitas Ekonomi dan Bisnis*. Vol, 1(1). 1-7. <https://doi.org/10.64465/jeeb.v1i1.7>
- Erawati, V., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1).
- Ewanan, F. V. K., & Sari, D. (2022). Dampak kebijakan keringanan pajak terhadap penerimaan pajak, tax ratio, dan perubahan penerimaan pajak: Analisis pengampunan pajak, sunset policy, dan program pengungkapan sukarela di Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(4), 3232-3246.
- Darma, S. S., & Sudarti, Z. (2023). Analisis Penerapan Tax Amnesty Terhadap Rasio Pajak Secara Nasional Dan Regional (Kabupaten Dan Kota Serang, Kabupaten Lebak, Pandeglang & Kota Cilegon). *AKUNTOTEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 15(1), 123-131. <https://doi.org/10.31253/aktek.v15i1.2044>.
- Ikung, L., & Haryana, R. D. T. (2023). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Informasi Pengampunan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 9350-9365.
- Januanisa, V., & Budiarti, N. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1341-1359. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.117>.
- Koapaha, H. P., & Pantow, R. A. (2021). Tingkat Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Tax amnesty pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bei. *Klabat Accounting Review*, 2(1), 66-79. <https://doi.org/10.60090/kar.v2i1.565.66-79>.
- Maharani, N. K. A., Datrini, L. K., & Larasdiputra, G. D. (2021). Pengaruh Tax amnesty E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Badung Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 87-91. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.2.3362.87-91>.
- Manik, T., & Harianto, D. (2024). Dampak Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Pajak. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 5(2), 30-38. <https://doi.org/10.53695/js.v5i2.1154>.
- Manubulu, H. A., & Cardoso, I. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti tax amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 12(3), 635-641. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1687>.

- Pratiknjo, M. L., & Lasdi, L. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan *Tax amnesty* Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 5(2), 141–156. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p141-156>.
- Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(1). <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v16i1.2415>.
- Pulu, F., Moroki, F., & Tala, O. (2022). Analisis Penerapan *Tax amnesty* Jilid I Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 297-306.
- Saputra, Z., Ammirudin., Mapparenta., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Center of Economic Students Journal*, 4(4), 304-322. <https://doi.org/10.56750/csej.v4i4.457>.
- Siregar, L. H., Syaharman, S., & Tari, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Warta Dharmawangsa*, 17(1), 65-80. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i1.2923>.
- Situmorang, D. M., & Pratama, E. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Implementasi Kebijakan *Tax amnesty*. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 3(2), 115-122. <https://doi.org/10.52447/map.v7i2.6626>.
- Suryati, F. E., & Hama, A. (2024). Analisis Tax Amnesty dan Tax Morale Terhadap Tax Compliance pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4636-4644. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4394>.
- Susanti, E. Y., Wibisono, W., & Maskur, M. (2022). Kebijakan Program *Tax amnesty* Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Program *Tax amnesty* 2016–2017). *El-Mahasaba*, 1(2), 1-13.
- Wulan, C., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2023). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak. *Binamulia Hukum*, 12(2), 487-496. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.775>.
- Wulaningrum, P. D. (2023). Analisis pengawasan pada wajib pajak pasca *tax amnesty* dalam meningkatkan penerimaan pajak (Studi kasus KPP Pratama Pekalongan). *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(1), 63-72. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i1.208>.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57-76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>.